

PEMILIHAN UMUM

14 Februari 2024



Single Stamps



Fulsheet



First Day Cover

PENGANTAR UMUM

Dalam rangka sosialisasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan PT. Pos Indonesia menerbitkan Prangko Seri Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024. Penerbitan ini sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat. Terdapat 3 desain pada prangko seri ini yaitu: (1) desain Maskot Sura Sulu, (2) desain Bangunan KPU dengan Bendera Parpol, dan (3) desain Jari Kelingking Celup Tinta Ungu. Tema utama dari 3 desain tersebut adalah Pemilu sebagai Sarana Integrasi Bangsa. Tema ini juga diharapkan sebagai komitmen bersama sebagai penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, dan pemangku kepentingan Pemilu dalam rangka mewujudkan Pemilu yang damai, demokratis, dan berintegritas. Tema ini dilatarbelakangi atas kesadaran bahwa Pemilu ataupun Pilkada merupakan arena konflik yang dianggap sah dan legal dalam rangka meraih atau mempertahankan kekuasaan. Perbedaan pilihan politik merupakan keniscayaan dalam berdemokrasi. Namun perbedaan tersebut tidak boleh memisahkan bangsa.

Desain keserentakan dalam Pemilu tahun 2024 dapat digunakan sebagai sarana integrasi bangsa. Tema ini sekaligus sebagai harapan dan cita-cita KPU pada Pemilu Serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Setidaknya, ada beberapa faktor terwujudnya Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Pertama dari segi penyelenggara, KPU memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU sebagai penyelenggara Pemilu berkomitmen bekerja sesuai norma yang berlaku. Kedua dari segi peserta Pemilu, faktor yang dapat mewujudkan Pemilu sebagai integrasi bangsa adalah peserta Pemilu yang mematuhi peraturan. Proses kontestasi diikuti sesuai regulasi. Ketiga dari segi pemilih, warga yang sudah memiliki hak pilih diharapkan dapat menjadi pemilih yang berdaulat, pemilih yang cerdas dengan memilih berdasarkan pertimbangan rasional, bukan emosional maupun transaksional.

(1) NARASI DESAIN PRANGKO MASKOT SURA SULU

KPU menetapkan gambar Sepasang Jalak Bali sebagai maskot untuk Pemilu Serentak 2024. Jalak Bali termasuk dalam satwa yang dilindungi. Secara filosofis, kicauan burung jalak Bali melambangkan suara pemilih. Mimik muka yang didesain "belia" mewakili pemilih Pemilu 2024 yang akan didominasi pemilih generasi muda.

SURA dan SULU digambarkan

menampilkan wajah tersenyum disertai bendera Indonesia di pipi dan kemudian mengenakan baju berwarna putih dengan logo KPU di tengahnya. Lingkaran mata berwarna biru merupakan ciri khas burung Jalak Bali. Maskot Pemilu 2024 SURA SULU adalah pasangan (grup) bukan 1 karakter (single) untuk mempertegas sosok pemilih pria dan wanita yang memiliki hak pilih sama dalam Pemilu.

SURA digambarkan sebagai sosok laki-laki, nama ini merupakan akronim "Suara Rakyat", sedangkan SULU digambarkan sebagai sosok perempuan, yang merupakan akronim "Suara Pemilu". Selanjutnya, SURA memegang paku pencoblosan sedangkan tangan lainnya mengacungkan jari kelingking berwarna ungu tanda sudah memilih, dan SULU memegang surat suara sedangkan tangan lainnya mengacungkan jari belakang berwarna ungu dan terdapat bulu mata di wajahnya. Selanjutnya, pengaturan Maskot ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 521 Tahun 2022 tentang Penetapan Maskot Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diterbitkan pada tanggal 14 Desember 2022.



2) NARASI DESAIN BANGUNAN KPU DENGAN BENDERA PARPOL

KPU merupakan lembaga pemerintah dengan tugas dan kewenangan menyangkut penyelenggaraan Pemilu, di mana berbagai kegiatan tersebut dipusatkan di Gedung KPU yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat. Gedung KPU adalah saksi bisu perhelatan politik bangsa Indonesia dan merupakan salah satu bangunan bersejarah yang masih ada hingga saat ini. Menurut laman Arsitektur Indonesia, pada awal



didirikan, bangunan itu merupakan Gedung Pusat Perkebunan Negara (PPN) yang memiliki peranan penting pada zaman awal kemerdekaan Indonesia sebagai wadah persatuan sejumlah perusahaan perkebunan dan pertanian yang dinasionalisasikan dari perusahaan-perusahaan Belanda. Ketika itu, sebagian besar pendapatan negara diperoleh dari ekspor hasil perkebunan, yang jumlahnya jauh lebih besar dari bidang perminyakan.

Sebelum masuk tahap pembangunan, desain Gedung PPN dilakukan oleh biro teknik Ingenieurs-Bureau Ingenegeren-Vrijburg (IBIV), Bandung dengan pendirinya adalah Ir AC Ingenegeren dan GS Vrijburg pada 1936. Kemudian, konstruksi gedung PPN dikerjakan oleh Ir. P Tool dan bekerja sama dengan kontraktor Nedam untuk membuat fondasi, sedangkan untuk konstruksi dan penyelesaian bangunan digarap oleh Hollandsche Beton Maatschappij (HBM). Hingga akhirnya pembangunan gedung itu rampung dilakukan pada 12 April 1955. Gedung ini hasil rancangan arsitek Belanda bernama A.W. Gmelig Meyling. Dia bekerja sebagai wakil direktur di biro Ingenegeren-Vrijburg NV (BIV) di Bandung.

Meyling sempat ditahan pada masa pendudukan Jepang, kemudian dibebaskan setelah kemerdekaan dan menjadi profesor luar biasa di Institut Teknologi Bandung. Sentuhan Meyling pada Gedung Pusat Perkebunan Negara memiliki ciri khas unsur kubistis kuat. Seluruh tampak muka dirancang dengan pembias (louvre) untuk mencegah sinar matahari masuk ruang-ruang kerja. Gedung PPN ini merupakan bangunan tertinggi di Jakarta pada saat itu, yang terdiri dari 4 lantai di mana setiap lantai memiliki ketinggian sekitar 5 meter untuk mengantisipasi faktor cuaca panas. Gedung PPN awalnya terletak di Jalan Nassau Boulevard yang kemudian berubah menjadi Jalan Imam Bonjol pada tahun 1950 an.

Gedung Pusat Perkebunan Negara (PPN) kemudian beralih fungsi menjadi kantor Lembaga Pemilihan Umum (LPU) pada 1987. LPU tadinya berkantor di Jalan Matraman Raya No. 40, Jakarta Timur. Tapi Kantor di Matraman itu sudah tidak layak lagi untuk mendukung pekerjaan staf LPU. Dalam pada itu LPU harus pindah dari Jl. Matraman Raya 40 ke Jl. Imam Bonjol No. 29, bekas gedung PPN.

Gedung KPU dibangun pada tahun 1934 dan pada tahun 2024, sudah masuk usianya mencapai 90 tahun dan berstatus sebagai bangunan cagar budaya yang ditinjau dari sisi usia 50 tahun atau lebih dan mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun serta memiliki arti khusus bagi sejarah dan bagi penguatan kepribadian bangsa Indonesia. Sejak berfungsinya Gedung KPU tahun 1987 di Jalan Imam Bonjol maka sering jadi pusat perhatian orang terkait dengan Pemilu. Sejak reformasi pada tahun 1998, Partai Politik sebagai peserta Pemilu terdaftar di KPU dengan jumlah partai politik yang berubah-ubah pada setiap penyelenggaraan Pemilu. Pada tahun 2024 ini, jumlah Partai Politik yang menjadi peserta Pemilu ada sebanyak 18 (delapan belas) partai politik Nasional dan 6 (enam) partai lokal di Provinsi Aceh. Bendera-bendara Partai Politik Nasional tersebut pada setiap Pemilu dipajangkan pada tiang bendera sesuai jumlah Partai Politik yang lolos sebagai peserta Pemilu di halaman depan Gedung KPU. Hal ini sekaligus untuk memberitahukan dan mensosialisasikan partai-partai politik tersebut kepada masyarakat luas. Gambar desain grafis Gedung KPU pada Prangko dirancang oleh tenaga Humas KPU pada tahun 2023, dengan menduplikasi dari kondisi sebenarnya dari bangunan KPU dengan 18 (delapan belas) bendera-bendara Partai Politik peserta Pemilu 2024.

(3) NARASI DESAIN PRANGKO JARI KELINGKING CELUP TINTA UNGU

Sejarah jari dicelupkan ke dalam tinta ini berasal dari negara India. Pemakaian tinta ini berawal dari Pemilu di India pada tahun 1962. Kejadian ini bermula pada tahun 1950, saat India tengah mengalami kendala saat Pemilu, banyak pemilih yang menggunakan hak suaranya sebanyak dua kali. Guna menghindari hal tersebut terulang kembali, maka pemerintah menghimbau agar para pemilih mencelupkan jarinya ke dalam tinta saat Pemilu ketiga pada tahun 1962. Selanjutnya, mencelupkan jari ke dalam tinta ini diikuti oleh 44 negara lain di dunia salah satunya di Indonesia.



Pemilu 1955 merupakan Pemilu pertama di Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno, yang memilih anggota DPR dan Konstituante. Namun, Pemilu tersebut sama halnya dengan saat ini tetapi tidak mencelupkan jari ke dalam tinta. Penggunaan tinta ungu usai mencoblos pertama kali diterapkan pada Pemilu 1999 pasca reformasi. Peristiwa mencelupkan jari ke tinta ungu bertujuan agar Pemilu tetap berjalan lancar tanpa kecurangan. Tinta digunakan sebagai penanda sudah menggunakan hak suara karena tinta yang ada pada kuku jari sulit dihilangkan. Hingga saat ini, termasuk pada Pemilu Serentak tahun 2024, mencelupkan jari kelingking ke dalam tinta ungu tetap dilaksanakan dengan ketentuan dan pengaturan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai pada logo KPU yang ada di botol tinta.

Selanjutnya, pada gambar jari kelingking terdapat peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Pada wilayah NKRI dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote terbentang sebanyak 38 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 kota, 1 kabupaten administrasi dan 5 kota administrasi. Kondisi ini menggambarkan bahwa dengan terlaksananya Pemilu secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL) akan menggambarkan dan berdampak kepada kemajuan akan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan bangsa Indonesia pada seluruh wilayah NKRI tersebut.

Potret jari kelingking dengan tinta ungu merupakan bukti bahwa pemilih sudah turut menggunakan hak suaranya pada Pemilu. Hal ini tentunya sebagai identitas bahwa seseorang telah menggunakan hak suaranya.



INTRODUCTION

In order to socialize the 2024 Simultaneous General Election, the General Election Commission (KPU) together with the Ministry of Communication and Information Technology (Kemkominfo) and PT Pos Indonesia issued the 2024 Simultaneous General Election Series Stamps. This issuance is a means of socialization to the public. There are 3 designs in this stamp series: (1) Sura Sulu Mascot design, (2) KPU Building design with Political Party Flags, and (3) Purple Ink Dipped Little Finger design. The main theme of the 3 designs is Election as a Means of National Integration. This theme is also expected as a joint commitment as election organizers, election participants, and election stakeholders in order to realize elections that are peaceful, democratic, and have integrity. This theme is motivated by the realization that elections are conflict arenas that are considered legitimate and legal in order to gain or maintain power. Different political choices are a certainty in democracy. However, these differences should not separate the nation.

The design of simultaneous elections in 2024 can be used as a means of national integration. This theme is also the KPU's hope and aspiration for the 2024 Simultaneous Election which will be held on Wednesday, February 14th, 2024. At least, there are several factors for the realization of elections as a means of national integration. First, in terms of organizers, the KPU ensures that the elections run in accordance with the provisions of the legislation. KPU as the election organizer is committed to working according to the applicable norms. Second, in terms of election participants, the factors that can achieve elections as a means of national integration are election participants who comply with regulations. The contestation process is followed according to regulations. Third, in terms of voters, citizens who already have the right to vote are expected to become sovereign voters, smart voters by choosing based on rational considerations, not emotional or transactional deliberation.

(1) NARRATIVE OF SURA SULU MASCOT STAMP DESIGN

The KPU has chosen the image of a pair of Bali Starlings (Bali Myna) as the mascot for the 2024 General Election. The Bali Starling is a critically endangered animal. Philosophically, the chirping of the Bali starling symbolises the voice of the voters. The "youthful" facial expressions represent the 2024 General Election voters who will be dominated by the younger generation of voters.

SURA and SULU are depicted with smiling faces with the Indonesian flag on their cheeks and then wearing white clothes with the KPU logo in the center. The blue eye circles are characteristic of the Bali Starling. The 2024 General Election mascot SURA SULU is a pair (group) instead of 1 character (single) to emphasise the figure of male and female voters who have the same voting rights in the General Election.

SURA is depicted as a male figure, the name is an acronym for "People's Vote (Suara Rakyat)", while SULU is depicted as a female figure, which is an acronym for "Election Vote (Suara Pemilu)". Furthermore, SURA holds a voting nail while the other hand holds up a purple little finger as a sign of having voted, and SULU holds a ballot paper while the other hand holds up a purple back finger and there are eyelashes on her face. Furthermore, the Mascot arrangement was stipulated in the General Election Commission Decree Number: 521 of 2022 concerning the Determination of the Mascot for the 2024 General Election which was issued on December 14th, 2022.



(2) NARRATIVE OF THE KPU BUILDING WITH POLITICAL PARTY FLAGS DESIGN

KPU is a government institution with duties and authorities regarding the implementation of elections, where various activities are centred in the KPU Building located at Jalan Imam Bonjol Number 29, Central Jakarta. The KPU Building is a silent witness to the political events of the Indonesian nation and is one of the historical buildings that still exist today. According to the Indonesian



Architecture website, when it was first built, the building was the State Plantation Centre (PPN) which played an important role in the early days of Indonesian independence as a forum for the union of a number of plantation and agricultural companies that were nationalised from Dutch companies. At that time, most of the country's revenue was derived from the export of plantation products, which was much larger than the oil sector.

Before entering the construction stage, the design of the PPN Building was carried out by the Ingenieurs-Bureau Ingenegeren-Vrijburg (IBIV) engineering bureau, Bandung with its founders Ir AC Ingenegeren and GS Vrijburg in 1936. Then, the construction of the PPN building was carried out by Ir P Tool and collaborated with the Nedam contractor to make the foundation, while the construction and completion of the building was carried out by Hollandsche Beton Maatschappij (HBM). The building was finally completed on April 12th, 1955. This building was designed by a Dutch architect named A.W. Gmelig Meyling. He worked as deputy director at the Ingeneren-Vrijburg NV (BIV) bureau in Bandung.

Meyling was arrested during the Japanese occupation, but was released after independence and became an extraordinary professor at the Bandung Institute of Technology (ITB). Meyling's touch on the State Plantation Center Building is characterised by strong cubistic elements. The entire façade is designed with a louvre to prevent sunlight from entering the work spaces. The PPN building was the tallest building in Jakarta at that time, consisting of 4 floors where each floor has a height of about 5 metres to anticipate hot weather factors. The VAT building was originally located on Nassau Boulevard which later turned into Imam Bonjol Street in the 1950s.

The State Plantation Center (PPN) building then changed its function to become the office of the General Election Board (LPU) in 1987. The LPU used to have its office at Jalan Matraman Raya No. 40, East Jakarta. But the office in Matraman was no longer suitable to support the work of LPU staff. The LPU had to move from Jl. Matraman Raya 40 to Jl. Imam Bonjol No. 29, the former PPN building.

The KPU Building was built in 1934 and in 2024, it will be 90 years old and has the status of a cultural heritage building that is reviewed in terms of age 50 years or more and represents a style period of at least 50 years old and has a special meaning for history and for strengthening the personality of the Indonesian nation. Since the functioning of the KPU Building in 1987 on Jalan Imam Bonjol, it has often been the center of attention of people related to elections. Since the reformation in 1998, political parties as election participants have been registered at the KPU with the number of political parties changing in each election. In 2024, there are 18 (eighteen) national political parties and 6 (six) local parties in Aceh Province. The flags of the National Political Parties in each election are displayed on the flagpole according to the number of Political Parties that qualify as election participants in the front yard of the KPU Building. This is also to inform and socialize the political parties to the wider community. The graphic design image of the KPU Building on the Stamps was designed by KPU Public Relations personnel in 2023, by duplicating the actual conditions of the KPU building with 18 (eighteen) flags of Political Parties participating in the 2024 Election.

(3) NARRATIVE OF PURPLE INK DIPPED LITTLE FINGER STAMP DESIGN

The history of fingers dipped in ink comes from India. The use of this ink originated from the elections in India in 1962. This incident began in 1950, when India was experiencing problems during the elections, many voters used their voting rights twice. To avoid this happening again, the government urged voters to dip their fingers in ink during the third election in 1962. Furthermore, dipping fingers in ink was followed by 44 other countries in the world, including Indonesia.



The 1955 election was the first election in Indonesia during the Soekarno administration, which elected members of the House of Representatives and the Constituent Assembly. However, the election was the same as today but did not dip the finger in ink. The use of purple ink after voting was first applied in the 1999 post-reform elections. The event of dipping fingers into purple ink aims to keep the election running smoothly without cheating. Ink is used as a marker for using voting rights because the ink on the fingernails is difficult to remove. Until now, including in the 2024 Simultaneous Elections, dipping the little finger into purple ink is still carried out with the provisions and arrangements set by the General Elections Commission according to the KPU logo on the ink bottle.

Furthermore, in the image of the little finger there is a map of the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which is one of the elements of the state which is a unit of land area, inland waters, archipelagic waters and territorial sea along with the seabed and land beneath it, as well as the air space above it, including all sources of wealth contained therein. In the territory of the Republic of Indonesia from Sabang to Merauke and from Miangas to Rote Island, there are 38 provinces, 416 regencies, 98 cities, 1 administrative district and 5 administrative cities. This condition illustrates that the implementation of Direct, Public, Free, Confidential, Honest and Fair Elections (LUBER JURDIL) will illustrate and have an impact on the progress of the welfare and quality of life of the people and the Indonesian nation throughout the territory of the Republic of Indonesia.

The portrait of the little finger with purple ink is proof that the voter has exercised his/her voting rights in the General Election. This is certainly an identity that someone has used their voting rights.

